



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan.....

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Maukaro tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.
- (3) Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana diamksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bab I

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Maukaro dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 November 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 November 2024

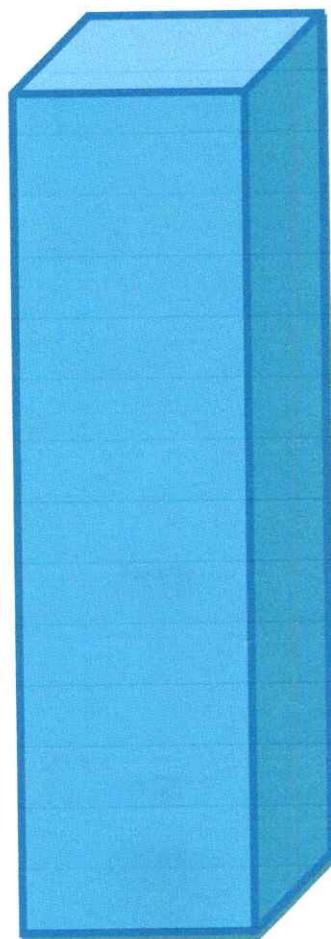




RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MAUKARO

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN MAUKARO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya, kami telah dianugerahkan rahmat yang berlimpah dalam upaya merangkum rangkaian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maukaro Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maukaro merupakan dokumen perencanaan strategis SKPD dalam hal ini Kantr Kecamatan Maukaro memprioritaskan rasionalitas kognifikasi pertanggungjawaban dan perwujudan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Maukaro ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijakan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Memberikan dokumen dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk koperasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang di selenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Maukaro.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan , sekaligus merupakan perwujudan amanat yang di emban oleh Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende.

Maukaro,.....2024



MANSOITUS BANA, S.STP

PEMBINA TK.I

NIP : 19680403 199701 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 59 TAHUN 2024
TANGGAL 4 November 2024
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
2.2. Landasan Hukum	2
3.3. Maksud dan Tujuan	4
4.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II. HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 202	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro	17
2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB . III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro	37

3.1.1. Tujuan Renja	37
3.1.2. Sasaran Renja	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
4.1.Rencana Kerja	53
4.2.Pendanaan Perangkat Daerah	53
 BAB. V. PENUTUP	54
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	54
5.2 Rencana Tindak Lanjut	54

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
2.1	Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende	10
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro	18
2.3	Keadaan Pegawai Kecamatan Maukaro	21
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende	25
3.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prekiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende	39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.1	Surat Keputusan Camat Maukaro Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2025	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangkamenengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana kerja (Renja)-SKPD tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-OPD.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro melakukan penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan Renja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Kecamatan Maukaro sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende mempunyai kewajiban yang sama. Hal ini dimaksudkan agar arah dan kebijakan perencanaan kegiatan OPD dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Maukaro sejalan dan saling bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Ende. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Maukaro dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh satuan kerja terkait dalam merencanakan kegiatan dan program di Kecamatan Maukaro.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Yang memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta

berperan strategis dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Berdasarkan isi dan kedudukannya, maka Renja OPD tahun 2025 menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Maukaro untuk tahun 2025.

Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistik, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
 8. Peraturan Dalam Negeri Ripublik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentan Sistim Informasi Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Dalam Negeri Ripublik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalrifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keungan Daerah.
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara TimurNimor 1 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026.
 12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 20216 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan.
 13. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Makksud disusunya Rencana Pembangunan Kecamatan Maukaro Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Maukaro untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut.

Adapun maksud penyusunan Renja Kecamatan Maukaro adalah

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
2. Sebagai acuan pelakanaan program dan kegiatan Kecamatan Maukaro selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025
3. Memberi arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Kecamata Maukaro tahun 2025.
6. Menjadi bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahu 2017 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja sebagai disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Maukaro

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro

3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MAUKARO

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024) bahwa dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran , tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025-2026 telah melakuakn dengan baik .Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dan program dan kegiatan yang memenuhi target hasil keluaran yang direncanakan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel . 2.1. Realisasi Kinerja Progaram/Kegiatan Tahun 2023

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	Penyelengaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisian selama satu tahun	%	100	100	98,17%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indeks pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	%	100	100	98,17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	18	98,17%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	%	100	94,65%	94,65%
Belanja Bahan dan alat logistik kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	2	1	94,65%
Belanja perjalanan dinas	Jumlah Laporan Perjalanan dinas	Laporan	12	12	94,65%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Indeks Penyedian jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100	91,67%	91,67%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6	5	90,98%
Penyedian jasa tenaga sopir	Jumlah tenaga Sopir yang yang disediakan	Orang	1	1	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	%	100	98,26%	98,26%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	1	1	98,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dengan baik</i>	%	100	100%	100%
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Publik lintas sektor di Kecamatan</i>	%	100	100%	100%

Daerah yang ada di Kecamatan					
Peninkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatn	Jumlah Laporan Peninkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatn	Laporan	6	6	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik	%	100	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100%	100%
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	100%

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di renstra kecamatan tahun 2019-2024 dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Maukaro di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maukaro antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat dua program yaitu program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang masing-masing memiliki target 100% dan realisasinya 100%..
2. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk program/kegiatan yang ada di Kantor Camat Maukaro yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang yang targetnya 100% dan realisasinya 98,17%

Sesuai dengan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Maukaro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori sangat baik yaitu dengan nilai 98,17% -100% hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut.

- a. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan
- b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan
- c. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Capaian Kinerja : 98,17% kategori Baik

Tabel. 2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Maukaro

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan									
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)									
UNSUR KEWILAYAHAN																			
1	14	KECAMATAN		100	Persen	-	100%	Persen	98,49%	Persen	98,49%								
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100	Persen	-	100%	Persen	98,40	Persen	'99,40%	100%	Persen	75,93%	Persen	42,71%		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,98%	Persen	1,00%	100%	Persen	100,00%	Persen	54,72%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	9	Dokumen	-	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	3	Dokumen	5	Dokumen	55,56%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00%

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	3	Dokumen	75,00%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	3	Dokumen	75,00%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	-	4	Laporan	4	Laporan	100,00%	4	Laporan	8	Laporan	50,00%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	Laporan	-	3	Laporan	3	Laporan	100,00%	3	Laporan	6	Laporan	50,00%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	-	100%	Persen	95,5%	Persen	95,50%	100	Persen	99,66%	Persen	50,42%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88/56	Orang/bulan	-	18 / 14	Orang/bulan	18 / 14	Org/bln	112,50%	20/14	Org/bln	36/28	Org/bln	45,50%
7	01	01	2,02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92	Dokumen	-	23	Dokumen	23	Dokumen	100,00%	23	Dokumen	46	Dokumen	50,00%
7	01	01	2,02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20	Orang/Tahun	-	5	Orang/Tahun	5	Orang/Tahun	100,00%	5	Orang/Tahun	10	Orang/Tahun	50,00%
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	-	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	2	Laporan	50,00%
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Bahan Tanggap Pemeriksaan	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00%

7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72	Laporan	-	18	Laporan	18	Laporan	100,00%	18	Laporan	36	Laporan	50,00%
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	-	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	2	Laporan	50,00%
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	01	2,03	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Orang/Bulan	-	1	Orang/Bulan	1	Orang/Bulan	100,00%	1	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	50,00%
7	01	01	2,03	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24	Laporan	50,00%
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	100	Persen	-	100%	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	0,66%	Persen	50,00%
7	01	01	2,05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	-	1	Orang	1	Orang	100,00%	1	Orang	2	Orang	50,00%
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,97%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	46,88%
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2	Paket	50,00%
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0	Paket	0,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2	Paket	50,00%
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24	Laporan	50,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Kali	-	1	Kali	1	Kali	100,00%	1	Kali	2	Laporan	50,00%

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100%	Persen	91,91%	Persen	91,91%	100	Persen	7,14%	Persen	7,69%
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	1	Unit	100,00%	0	Unit	1,00	Unit	25,00%
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	-	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	0	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	0	Unit	0	Unit	0,00%	-	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,89%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	58,87%
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Meyurat	24	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24,00	Laporan	100,00%
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	11	Bulan	23,00	Bulan	47,92%
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24,00	Laporan	50,00%
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Orang	-	1	Orang	1	Orang	100,00%	1	Orang	2,00	Orang	50,00%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,97%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	23,08%
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	-	6	Unit	3	Unit	50,00%	0	Unit	3,00	Unit	25,00%
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	0	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	89%	Persen	0,89%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Dokumen	50,00%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	100,00%
7	01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Percentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	57,69%	Persen	0,58%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100%	Persen	39,20%

7	01	03	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	100,00%	Persen	39,20%
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	72	Kali	-	18	Kali	18	Kali	100,00%	18	Kali	36,00	Kali	50,00%
7	01	03	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	32	Kali	102,00	Kali	36,43%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	45,00%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	-	100	Persen	99,95%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	45,00%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	56	Kali	126,00	Kali	45,00%
7	01	06	2.02	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar	420	Kali	-	80	Kali	80	Kali	100,00%	65	Kali	145,00	Kali	34,52%
7	01	06	2.02	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan aset desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	66	Kali	136,00	Kali	48,57%
7	01	06	2.02	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik.	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	63	Kali	133,00	Kali	47,50%
7	01	06	2.02	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksanya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	65	Kali	135,00	Kali	48,21%
7	01	06	2.02	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	66	Kali	136,00	Kali	48,57%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	0%	Persen	0,00%	100	Persen	0,00	Persen	0,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	-	100	Persen	0%	Persen	0,00%	100	Persen	0,00%	Persen	0,00%		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila	8	Kali	-	2	Kali	0	Kali	0,00%	0	Orang	0,00	Orang	0,00%		
7	01	05	2.02	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4	Paket		1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0,00	Paket	0,00%		
7	01	05	2.03	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan lainnya	4	Paket		1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0,00	Paket	0,00%		
7	01	05	2.02	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila	4	Paket		1	Paket	0	Orang	0,00%	0	Orang	0,00	Orang	0,00%		
7	01	05	2.02	6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir Pancasila	4	Paket		1	Paket	0	Desa	0,00%	0	Desa	0,00	Orang	0,00%		

6.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro dilakukan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2019-2024 sedangkan tolok ukur SPM dan indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Maukaro belum ditetapkan indikator pelayanannya yang disajikan pada tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel. 2.2.1

**Indikator Kinerja Kecamatan Maukaro yang mengacu pada tujuan sasaran
RPJMD (Renstra 2019-2024)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	OPINI BPK	NILAI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	NILAI AKIP	NILAI	cc	cc	Bb	bb	bb	bb
3	NILAI LPPD	NILAI	2.8458	2.8458	2.958	2.958	2.958	2.958
4	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-

Tabel. 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisaasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Masyarakat dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
4	Menurunnya Kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
5	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
6	Persentase Desa yang menetapkan Dokumen Perencanaan dan penyelenggaraan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
7	Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemandirian desa Kecamatan Maukaro dapat digambarkan, pada tahun 2021 adalah 9 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang. Pada tahun 2022 adalah 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang sedangkan pada tahun 2023 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang. Diproyeksikan pada tahun 2024 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang dan pada tahun 2025 diproyeksikan 7 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang 2 Desa Maju. Tingkat kemajuan desa yang pada tahun 2021 belum ada nilainya karena belum ada data dukung yang diperoleh. Target indikator kedua ini pada tahun 2022 sebesar 85 %, tahun 2023 95% dan proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 95%. Nilai indikator kinerja kedua ini diperoleh dari data perbandingan antara Dasa Wisma aktif, Karangtaruna aktif, Posyandu aktif, LPM aktif, wajib pajak taat bayar PBB dan angka penurunan stunting. Perolehan Nilai AKIP Kecamatan Maukaro pada tahun 2022 adalah "c", pada tahun 2023 adalah "cc" dan diproyeksikan pada tahun 2024 dan 2025 dapat memperoleh masing-masing nilai "b"

6.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemerintah Kecamatan Maukaro, berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Kecamatan Maukaro dapat menjalankannya dengan baik, namun secara teknis masih terdapat beberapa masalah yang harus diatasi; antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan SDM aparatur Pemerintah kecamatan yang kompeten, karena itu harus dilaksanakan diklat-diklat dan bimtek-bimtek ke luar daerah; akan tetapi yang sering terjadi adalah aparatur yang mengikuti bimtek dan diklat merupakan aparatur yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak akan memberikan dampak bagi peningkatan SDM aparatur kecamatan. Melihat hal tersebut diatas, maka sangatlah dibutuhkan aparatur yang berkualitas, karena itu segala bentuk diklat dan bimtek perlu dilaksanakan secara bergantian antar aparat sehinggaadanya keseimbangan dalam peningkatan SDM dan terwujudnya optimalisasi SDM aparatur Pemerintah Kecamatan Maukaro.

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk program ini belum adanya kerjasama tim / antar aparat sehingga masih mengalami kendala dalam pelaporan, terutama dari segi waktu, sering kali terjadi

keterlambatan dari beberapa desa dan kelurahan sehingga aparatur kecamatan harus menjemput data-data laporan tersebut ke desa-desa. Masih terdapatnya perbedaan format/bentuk pelaporan bulanan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, karena itu pemerintah kecamatan harus melakukan bimbingan,pembinaan dan penataan secara rutin.

- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.

Untuk sistem pengawasan selama ini belum semuanya terarah dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan juga karena keterbatasan aparatur kecamatan. Dalam kaitan dengan fungsi pemberdayaan, masih terdapat kelompok-kelompok bantuan di masyarakat yang belum terjangkau untuk diberdayakan; sedangkan dalam bidang pemerintahan, masih dibutuhkan pembinaan administras desa secara terus menerus, meningkatkan koordinasi lintas sektor; dalam fungsi keamanan dan ketertiban masih sangat minimnya tenaga aparatur kecamatan baik dari segi kualitas untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan pemberdayaan pembangunan dalam wilayah kecamatan karena ini merupakan indikator utama yang masuk dalam dokumen RPD Kabupaten Ende

Beberapa masalah dan hambatan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas fiskal rill daerah yang masih sangat terbatas sehingga berdampak pada pendanaan untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat strategis di Kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, apalagi kalau dilihat dari letak kecamatan Maukaro berbatasan dengan Laut Sawu di Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah Selatan,berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Timur dan berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Barat sehingga sarana dan prasarana umum harus dibangun dengan baik;
2. Belum adanya regulasi dalam hal ini peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat, sehingga ruang gerak kecamatan dalam hal pelayanan belum jelas, pemerintah kecamatan hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutinitas saja;
3. Kecamatan tidak diberikan ruang yang luas dalam pembinaan pengelolahan dana desa sehingga berdampak pada keterlambatan pengelolahan dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga evaluasi;
4. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Kecamatan Maukaro
Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan/ Latar Belakang Pendidikan	Kondisi Staf	
			Keadaan Pegawai	Jumlah Pegawai yang diharapkan
1.	Camat	Strata Satu (S2) (Master Hukum)	1 Orang	
2.	Sekretaris Camat	Strata Satu (S1) (Serjana Ilmu Pemerintahan)	1 Orang	
3.	Kasie Pemerintahan	-	-	1 Orang
4.	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa	Strata Satu (S1) (Serjana Pertanian)	1 Orang	
5.	Kasie Pelayanan Umum	Strata Satu (S1) (Sarjana Hukum)	1 Orang	
6	Kasie Polisi Pamong Praja dan Linmas	Strata Satu (S1) (Serjana Sosial)	1 Orang	
7.	Kasie Kesejahteraan Masyarakat	Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial)	1 Orang	
8.	Kasubbag Program Keuangan dan Pelaporan	Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial)	1 Orang	
9.	Kasubbag Keppegawaiian	Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial)	1 Orang	
10	Staf	SMA Sederajat	10 Orang	

Dari komposisi yang ada jumlah pegawai di Kantor Camat Maukaro sebanyak 18 orang, dimana 8 orang menduduki jabatan dan 10 orang sebagai staf. Oleh sebab itu banyak tugas yang dikerjakan oleh kepala seksi yang sebenarnya porsinya staf ataupun sebaliknya ada juga tugas yang porsinya para kepala seksi dan kasubbag yang dikerjakan oleh staf. Selain mengerjakan tugas pokok dalam tiap seksi, staf juga ditunjuk oleh pimpinan sebagai bendahara baik rutin maupungaji. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di kecamatan Seharusnya tiap seksi membawahi 4 orang staf sementara tiap kasubbag membawahi 3 orang staf, sehingga tidak terjadi pembebasan tugas tambahan yang melebihi tugas pokok.

Dari gambaran masalah yang dihadapi tersebut, maka dampak yang akan sangat dirasakan adalah besarnya ketergantungan camat terhadap alokasi kegiatan Dinas, Badan dan Kantor (PD di Kabupaten), meskipun hal yang sangat berhubungan dengan tugas-tugas atributif (yang melekat pada jabatan).

Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepada daerah : "*membangun dari Desa dan Kelurahan*", serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Beberapa tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Maukaro adalah :

a. Peluang

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang sudah tertata dengan baik;
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merumuskan perencanaan kegiatan dan keuangan (meski baru sebatas kegiatan rutin);
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Adanya Situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maukaro.

b. Tantangan

1. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai
2. kebijakan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Maukaro;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
4. Daya dukung kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang masih belum seimbang dengan tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini;
5. Kondisi geografis wilayah dengan topografis daerah pegunungan, menyebabkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi dan kesulitan dalam memprediksi kemampuan potensi wilayah secara riil dalam kerangka persiapan perencanaan yang berkualitas;
6. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
7. Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selain semakin menegaskan hakikat otonomi desa tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Merumuskan Pendeklarasi sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah kepada Camat. Hal ini akan memberikan peluang dalam hal pendekatan pelayanan dan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, serta memudahkan bagi kecamatan dalam melakukan pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal.
2. Memberikan kesempatan kepada kecamatan untuk merencanakan anggaran yang langsung berhubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan pemerintahan desa (Bimtek bagi aparat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa) serta pengembangan kapasitas pegawai (BKPSDM). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Semakin memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah (koordinator penyelenggaraan pemerintahan) di wilayah kecamatan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban dimana kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki sehingga dilakukan seleksi terhadap pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan program pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota.

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Maukaro untuk Tahun 2025 masih tetap sama/tidak mengalami perubahan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan pertama-tama atas pertimbangan kondisi riil, kebutuhan organisasi serta bertujuan meningkatkan daya dukung terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan.Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pada Tahun Anggaran 2024 kegiatan ini ada dalam RKA/DPA, sehingga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan kembali dalam Renja Kecamatan demi tercapainya Peningkatan sumber daya Aparatur.

Penjelasan mengenai Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel 2.4 (terlampir).

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kecamatan				1.764.529.952	Kecamatan				1.638.491.764
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.650.529.952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.650.529.952
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	32.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	32.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.900.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000

No	Rancangan Awal RKP1					Kab. Ende, Kecamatan Maukaro				
	Program/Kegiatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.206.029.952	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.206.029.952
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.189.529.952	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.189.529.952
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Kab. Ende, Kecamatan Maukaro				
	Program/Kegiatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	17.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	17.500.000
	Penyusunan Perencanaan Kubutuhan barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kubutuhan barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Perencanaan Kubutuhan barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kubutuhan barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	3.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	4.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	4.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	4.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8.500.000
	Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.000.000	Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.000.000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.000.000

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	2.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	2.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	2.50.0000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	2.50.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	155.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	155.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.000.000
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyedian Bahan Logistik Kantor	1 Paket	15.000.000	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Penyedian Bahan Logistik Kantor	1 Paket	15.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	24.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	70.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	25.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	10 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	10 Unit	25.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	18.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	18.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	47.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	47.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	14.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	14.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	15.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	116.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	116.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	61.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	61.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	15.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	30.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	10.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	10.000.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100%	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100%	20.000.000

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dolumen	10.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dolumen	10.000.000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	10.000.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	10.000.000
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	11.500.000	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	11.500.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik	100 %	5.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik	100 %	5.500.000
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Lambaga Kemasyarakatan Yang Berpastisipasi i Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3 LembagaKe masyarakat a	3.000.000	Peningkatan Pastisipasi i Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Lambaga Kemasyarakatan Yang Berpastisipasi i Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3 LembagaKe masyarakat a	3.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	JumlahLaporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2.500.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	6.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	6.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 LembagaKe masyarakat a	2.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 LembagaKe masyarakat a	2.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3 LembagaKe masyarakat a	2.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3 LembagaKe masyarakat a	2.000.000

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	2.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	5.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	5.000.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.000.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	15.000.000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100%	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100%	15.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Orang	15.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Orang	15.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	42.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	42.500.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42.500.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	18.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	18.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	14.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	14.500.000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Kecamatan Maukaro	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	10.000.000

1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja adalah melalui mekanisme yang diawali dari musrenbang Desa, musrenbang kecamatan hingga di forum OPD. Dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan 10 kegiatan yang dibahas di forum Musrenbang Kecamatan dan 5 kegiatan diverifikasi OPD Teknis untuk ditentukan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. akan masuk kedalam Rencana Kerja OPD Teknis, dari 15 Usulan dapat diuraikan sebagai berikut :

10 (sepuluh) Usulan yang dibahas di Forum Musrenbang tingkat Kecamatan, yaitu :

1. Rehabilitasi Pustu Nabe dan Fasilitas Pendukungnya
2. Rehabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDK Kamubheka;
3. Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan SDI Ratesuba;
4. Pengembangan Pustu dan Fasilitas Pendukungnya Desa Nabe;
5. Bantuan Peralatan Tenun Ikat industri kecil bagi kelompok di Desa Magekapa;
6. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Kebirangga;
7. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Nioniba;
8. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Magekapa;
9. Urukan dan Drainase Puskemas Maukaro;
10. Pembagunan Rumah tidak layak huni perdesaan Desa Kebirangga Selatan;
11. Pembangunan Lumbung Pangan Desa di Desa Natanangge;

Sedangkan 5 usulan yang diverifikasi oleh OPD Teknis adalah :

1. Rahabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDI Ratesuba;
2. Rahabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDK Kamubheka;
3. Urukan dan Drainase Puskemas Maukaro;
4. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Magekapa;
5. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Pantai Maukaro dan Nioniba.

sedangkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tidak ada yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025, dan adapun usulan-usulan di atas yang tidak diterapkan kedalam renja Kecamatan Maukaro tetapi masuk pada Renja Perangkat Daerah Teknis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan kerangka arah pembangunan pada RPD tahun 205-2026 yang merupakan terjemahan dari visi misi dan 5 arahan utama Persiden dan wakil Persiden yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan perangkat daerah maka telah di tetapkan 7 agenda utama pembangunan.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Maukaro memiliki relevansi dan mendukung seluruh agenda pembangunan Nasional terutama melalui agenda ke 7. Sedangkan salah satu kelembagaan yang melaksanakan agenda pembangunan nasional yang ketujuh adalah kementerian dalam negeri. Hal ini merujuk pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang renstra kementerian dalam negeri. Sehiangga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro perlu merujuk pada renstra kementerian dalam negeri. Selain itu Renstra kecamatan Maukaro juga perlu pelakuan telaan RPD Provinsi NTT karena kecamatan Maukaro berada di wilayah provinsi NTT.

Berikut ini tabel yang menggambarkan keselarasan antara RPD Tahun 2025-2026, Renstra Kementerian Dalam negeri Tahun 205-2026, Perda Provinsi NTT Nomor 04 tahun 2019 dan sasaran RPD sesuai peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-

2026 yang menjadi bahan perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1
Penyelarasan tiap tingkatan pembangunan dalam perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026

Agenda utama/prioritas pembangunan nasional	Tujuan Strategis Kemendagri	Agenda utama/prioritas pembangunan Daerah Provinsi NTT	Tujuan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
<u>Prioritas Ke-Tujuh</u> Memperkuat stabilitas Politik, Hikum, Pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik	1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa(T1) 2. Peningkatan kapasitas dan sinergis pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) 3. Peningkatan Tata Kelolah Pemerintahan yang baik dilingkungan Kementrian Dalam Negeri (T3)	<u>Prioritas Ke-Lima</u> Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birikrasi.	<u>Tujuan Ke-5.1</u> Terwujudnya tata kelolah Pemerintahan yang baik (Good Governance) <u>Sasaran Ke 5.1.1</u> Meningkatnya Birokrasi yang bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat ditentukan faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro dalam upaya mendukung kinerja program untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Ende serta secara tidak langsung juga akan berkontribusi dalam pencapaian agenda utama/prioritas maupun tujuan pembangunan pada tiap tingkatan antara lain.

1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu)
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam segala bidang.

3. Tingkat kesadarn masyarakat yang masih Rndah baik dalam penerapan pola hidup sehat, menciptakan suasana yang aman dan tenram maupun meningkatkan kemandirian hidup.
4. Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang masih rendah.
5. Kurangnya juknis/juklak dalam pelaksanaan kinerja program.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum memadai. Secara normal jabatan baik JA, memiliki peran dan tugas yang saling mendukung serta tiap jabatan memiliki beban kerja masing-masing sehingga perlunya kualitas sumber daya manusia untuk mengisi tiap jabatan namun kondisi personil di Kecamatan Maukaro sangat tidak memadai dan dalam kondisi sekarang para pemangku jabatan terpksa juga melaksanakan tupoksi baik JFP dengan demikian proses pelayanan dan penyelesaian pekerjaan tidak berjalan dengan baik dan optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 mengalami perubahan yaitu “**Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien**” tujuan tersebut akan di ukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK 2. Nlai AKIP 3. Nilai LPPD/ Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh setiap instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (Tahunan,Semesteran,Bulanan) dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan renstra kecamatan maukaro menetapkan sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatkan kinerja perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Efaluasi. 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan baik. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran jangkah menengah pelayanan Kecamatan Maukaro
(Renstra 2025-2026)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOT TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD 4. Skor Kinerja Penyelenggara n Pemerintah Daerah	Opini Nilai Nilai	-	WTP CC 2.8452	WTP B 2.9580	WTP B 2.9580	WTP B 2.9580	
			1. Meninkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evalausi		Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai	-	CC	B	B
			1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa		Tingkat Kemadiran Desa 1. Desa sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal 3. Desa Berkembang 4. Desa Maju	Desa	-	-	-	-
						-	-	10	8	8
						-	1	2	2	2
						-	-	1	1	2

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai pembanding dengan rancangan awal RPD kabupaten ende Tahun . Analisis kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan Maukaro Tahun 2025 yakni menyelenggarakan 6 (enam) program 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 59 (lima Puluh Sembilan) sub kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

KECAMATAN MAUKARO

KODE REKENING							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	01						KECAMATAN				1.764.529.952				1.792.864.898
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	1.650.529.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	1.658.364.898
7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	32.50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	34.000.000
7	01	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	8.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	8.000.000
7	01	01	2	01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5.000.000

7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	5.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	6.000.000
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5.000.000
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5.000.000
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5.000.000
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah secara lengkap, memadai dan tepat waktu	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	-
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	1.206.029.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	1.183.968.898
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya Tambahan Penghasilan Pegawai	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	1.169.529.952	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	1.165.964.898

7	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	18.500.000
7	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kubutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kubutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000
7	01	01	2	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000

7	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	11.000.000
7	01	01	2	06	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000
7	01	01	2	06	0003	Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	2.000.000
7	01	01	2	06	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000
7	01	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	3.000.000

7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	156.900.000
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15.000.000
7	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000
7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ptersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15.000.000
7	01	01	2,06	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan Dokumen Kantor Terlaksananya Penggandaan Bahan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	11.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	12.000.000
7	01	01	2,06	6	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	24.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	20.400.000

7	01	01	2,06	8	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan dalam rapat koordinasi internal dan konsultasi di luar daerah Tersedianya makan minum harian rapat bulanan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	73.000.000
7	01	01	2,06	8	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.500.000
	7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara baik selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	69.000.000
7	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	25.000.000
7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	25.000.000
7	01	01	2	07	0011	Pengadaan Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	19.000.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	47.000.000

7	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	4.000.000
7	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	14.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15.000.000
7	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	14.000.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	14.000.000
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Baik selama 1 tahun	Kecamatan Maukaro	100%	116.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	138.000.000
7	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15.000.000
7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	61.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	70.000.000

7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	-
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabilitasi gedung kantor dan banguna lainnya	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	18.000.000
7	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan banguna lainnya	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	18.000.000
7	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor dan banguna lainnya	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	17.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	35.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maukaro	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000

7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Maukaro	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
7	01	02	2	03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	12.500.000
7	01	02	2	03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	12.500.000
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maukaro	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	-
7	01	02	2	04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	-
7	01	02	2	04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	-
7	01	02	2	04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	-

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	20.000.000
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Baik	Kecamatan Maukaro	100%	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	14.000.000
7	01	03	2	01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	03	2	01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maukaro	100%	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	6.000.000
7	01	03	2	3	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksannya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	2.000.000
7	01	03	2	3	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	2.000.000

7	01	03	2	3	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	2.000.000
7	01	06				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	20.000.000
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maukaro	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	14.000.000
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	04	2	01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	7.000.000
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Maukaro	100%	5.000.000			100%	6.000.000
7	01	04	2	02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	6.000.000

7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	15.000.000
7	01	03	2.03			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maukaro	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	15.000.000
7	01	05	2	01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terciptanya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	42.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	45.500.000
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100%	42.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%	45.500.000
7	01	06	2	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	18.000.000
7	01	06	2	01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	14.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	14.500.000

7	01	06	2	01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	12.000.000
---	----	----	---	----	------	---	---	--------------------------------------	-------	------------	---------------------------------------	--	-------	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro pada tahun 2025 yang diawali dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan (Juli s/d Desember 2024)

- Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Kecamatan Maukaro sebagai bahan Rancangan APBD 2025;
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan;
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan);
- Persiapan proses pengadaan barang/jasa.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2025

c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
- Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja);

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Pendanaan Perangkat Daerah melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Maukaro sesuai dengan Dokumen RPD tahun 2025 semuanya berasal dari APBD Kabupaten Ende dengan Pagu Rp.1.764.529.952,-

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya rencana Alokasi program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Maukaro); yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA / DPA Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2024 dikendalikan oleh Camat Maukaro selaku Kepala SKPD dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan. Dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi (Sekretariat dan seksi) di Kecamatan Maukaro.
3. Camat akan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya menjadi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Maukaro dalam bentuk: Laporan Rutin Kegiatan Bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan, serta Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada akhir Tahun Anggaran. Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka review Rencana Kerja tahun berikutnya.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka Kecamatan Maukaro akan menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Maukaro ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, khususnya bagi Kecamatan Maukaro.

